

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lampung Selatan merupakan pusat kota dan ibukota kabupaten. Pembangunan merupakan rangkaian dari program-program di segala bidang secara menyeluruh, terarah dan berkesinambungan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional dan menjadi penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui kewenangan otonomi yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentigan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada kepentingan di atas, jelas pada pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Hal ini membawa konsekwensi semakin kecilnya peranan pemerintah pusat dalam mengurus pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk kebutuhan pembangunannya, sehingga menuntut daerah untuk mampu membiayai sendiri kebutuhan pembangunan. Dengan demikian kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai potensi sumber penerimaan daerah menjadi sangat

menentukan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerahnya. Berdasarkan uraian di atas semakin jelas bahwa peranan pemerintah daerah dalam pembangunan semakin berat, khususnya di bidang keuangan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan semua itu masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Besarnya penerimaan yang berasal dari PAD mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan sekaligus mencerminkan kemampuan aparat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam menghimpun serta menggali potensi yang terdapat di daerah tersebut.

Pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan berbagai urusan rumah tangga daerah. Mengingat kebutuhan dana yang di perlukan untuk tahun anggaran berikutnya semakin besar guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah daerah setempat serta dinas yang terkait harus mampu menghimpun dana serta menggali potensi yang ada secara maksimal.

Kabupaten Lampung Selatan adalah daerah yang cukup potensial untuk berkembang sangat mengharapkan tercapainya otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata mengandung pengertian bahwa pemberian otonomi daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan, dan tindakan serta suatu kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa pemberian otonomi pada daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya yakni dapat melancarkan usaha pembangunan yang tersebar diseluruh negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dikutip dari Ratnawati 2001 : 1).

Menurut Josef Riwo Kaho (1995 : 25), suatu daerah dapat dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri apabila memiliki atribut sebagai berikut :

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah yang merupakan urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat pada daerah
2. Urusan rumah tangga itu diatur, diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri
3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga tersebut maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pusat, yang mampu mengurus rumah tangganya
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangganya.

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus terus berpacu dan berusaha untuk menggali potensi dan menata sumber-sumber pendapatan yang ada secara intensif yang diharapkan mampu memberikan porsi PAD yang lebih besar terhadap APBD. Dengan kondisi seperti inilah fungsi desentralisasi fiskal yang merupakan peran dan tanggung jawab pemerintah sangat diperlukan. Hubungan antara kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang penting. Karena dengan suatu penetapan kebijakan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan potensi yang ada guna peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan.

**Tabel 1. Perkembangan Penerimaan PAD Kabupaten Lampung Selatan
Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam jutaan)**

Tahun	Jenis Pendapatan Asli Daerah				Total	Pertumbuhan
	Pajak daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Lain-lain PAD yang sah		
2004	4.740.969,08	5.089.705,27	42.670.100	3.025.776,18	12.899.120,63	-
2005	5.103.079,77	5.747.864,36	31.039.000	5.505.366,67	16.387.349,79	27,04%
2006	6.624.195,02	6.022.538,59	1.762.444,00	4.714.962,00	19.124.139,62	16,70%
2007	6.824.192,00	7.066.367,00	2.255.883,00	8.319.328,00	24.465.770,00	27,93%
2008	7.525.249,83	6.977.694,49	5.000.000	6.768.980,09	21.276.924,42	(13,03)%
Rata-rata						14,66%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Dari data Tabel 1 dapat terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 mengalami peningkatan total pertumbuhannya sebesar 71,67% seiring dengan digulirkannya otonomi daerah. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2007 menuju Tahun Anggaran 2008 PAD Lampung Selatan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.24.465.770,00 menjadi Rp.21.276.924,42. Retribusi Daerah dua tahun terakhir lebih kecil dari Pajak daerah karena pada Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Lampung Selatan masih bergabung dengan Kabupaten Pesawaran sehingga retribusi dan pajak daerahnya masih stabil. Kemudian pada Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Lampung Selatan tidak digabung lagi dengan Kabupaten Pesawaran. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Lampung Selatan Retribusi daerahnya dua tahun terakhir lebih kecil dari Pajak daerah.

Pertumbuhan yang sangat tinggi terlihat pada Tahun Anggaran 2007 yaitu sebesar 27,93%. Sedangkan pertumbuhan yang sangat rendah terlihat pada Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar (13,03%). Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 14,66%. Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi yang paling besar terhadap kenaikan PAD, dilanjutkan dengan retribusi daerah, pajak daerah dan laba usaha daerah.

Perbandingan antara target dan realisasi penerimaan yang diperoleh dari PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 dapat dilihat dari Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam jutaan)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase
2004	12.854.373,00	12.899.120,63	100,35%
2005	16.173.140,78	16.387.349,79	101,32%
2006	20.886.708,23	19.124.139,62	91,56%
2007	25.325.431,00	24.465.770,00	96,60%
2008	42.066.352,76	21.276.924,42	50,58%
Rata-rata			87,88%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Tabel 2 memperlihatkan bahwa selama Tahun Anggaran 2004-2008 realisasi terhadap target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 87,88 persen per tahun. Di mana setiap tahunnya mengalami pertumbuhan pencapaian target cukup baik. Penurunan terjadi pada Tahun Anggaran 2007 menuju Tahun Anggaran 2008 Capaian target cenderung menurun dan melampaui batas toleransi capaian target karena pada Tahun Anggaran 2004-2007 Kabupaten Lampung Selatan masih bergabung dengan Kabupaten Pesawaran sehingga capaian target meningkat dan masih dalam

batas toleransi capaian target. Kemudian pada Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Lampung Selatan tidak digabung lagi dengan Kabupaten Pesawaran. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pada Kabupaten Lampung Selatan capaian targetnya cenderung menurun dan melampaui batas toleransi capaian target.

Penerimaan daerah yang diperoleh dari PAD pada Tahun Anggaran 2004, 2005 mencapai target sebesar 101,35%, 101,32%. Namun pada Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008 target yang telah ditentukan tidak berhasil direalisasikan sampai dengan 100% karena PAD yang diterima dengan capaian target sebesar 91,56%, 96,60%, 50,58%.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak serta penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Besarnya dana perimbangan dari Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 yang diterima dari pemerintah pusat dapat dilihat dari Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam jutaan)

Tahun	Jenis Penerimaan				Total	Pertumbuhan %
	Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak	DAU	DAK		
2004	38.838.486,09	15.500.421,29	335.148.173,00	12.050.000,00	401.537.080,38	-
2005	52.777.290,66	27.165.697,00	337.196.000,00	13.890.000,00	431.028.987,66	7,34
2006	103.302.117,00	26.002.989,00	532.654.000,00	39.160.000,00	701.119.106,00	62,66

2007	117.046.384,00	17.307.756,00	600.928.423,00	64.764.947,00	800.047.510,00	14,11
2008	66.402.142,39	2.198.650,96	658.043.650,00	77.819.000,00	804.463.443,35	5,52
Rata-rata						22,41

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Dari Tabel 3 terlihat bahwa dana perimbangan Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Besarnya dana perimbangan Kabupaten Lampung Selatan dari tahun ke tahun selalu meningkat, tetapi pertumbuhan penerimaan dana perimbangan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2006 sebesar 62,66% yaitu dari total dana perimbangan Rp. 431.028.987,66 menjadi Rp. 701.119.106,00. sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2008 yaitu sebesar 5,52%. Dua tahun terakhir ternyata Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung menurun karena pada Tahun Anggaran 2004-2007 Kabupaten Lampung Selatan masih bergabung dengan Kabupaten Pesawaran sehingga Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak masih stabil. Kemudian pada Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Lampung Selatan tidak digabung lagi dengan Kabupaten Pesawaran. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Lampung Selatan dua tahun terakhir ternyata Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajaknya cenderung menurun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai salah satu kriteria dalam pemberian otonomi daerah dan idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD.

Tabel 4 dibawah ini akan memperlihatkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 4. Kontribusi PAD Terhadap Total Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008

Tahun	Total Penerimaan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi PAD (%)
2004	414.802.941,39	12.899.120,63	3,10
2005	473.651.789,70	16.387.349,79	3,46
2006	723.005.811,62	19.124.139,62	2,64
2007	850.931.776,00	24.465.770,00	2,87
2008	825.749.367,77	21.276.924,42	2,58
Rata-rata			2,93

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Ini terlihat dari besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD yang rata-rata hanya memberikan kontribusi sebesar 2,93% terhadap APBD setiap tahunnya. Kenyataan tersebut mengakibatkan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas yang cukup berat untuk merangsang dan meningkatkan PAD guna pembiayaan kegiatannya.

Tabel 5 berikut ini akan menyajikan besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Tabel 5. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam persen)

No	Kabupaten /Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Kontribusi PAD 2004-2008 (%)
1	Kota Bandar Lampung	9,94%	11,20%	7,70%	9,81%	8,77%	9,48
2	Kab. Way Kanan	1,81%	1,11%	2,45%	1,72%	2,88%	1,99
3	Kab. Tulang Bawang	1,81%	1,73%	1,64%	2,00%	2,65%	1,97
4	Kab. Tanggamus	2,55%	2,86%	2,64%	2,42%	2,31%	2,56
5	Kab. Lam Timur	2,07%	1,67%	2,65%	3,38%	2,76%	2,51
6	Kab. Timur Utara	2,86%	2,46%	2,17%	2,55%	1,00%	2,21
7	Kab. Lam Tengah	2,47%	2,50%	1,71%	2,22%	2,65%	2,31
8	Kab. Lam Selatan	3,11%	3,46%	2,64%	2,87%	2,58%	2,93
9	Kab. Lam Barat	2,35%	2,54%	2,98%	2,70%	2,87%	2,69
10	Kota Metro	6,69%	6,69%	6,09%	6,50%	6,75%	2,54
11	Kab. Pesawaran	-	-	-	-	12,70%	12,70
Rata-rata							4,35

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat terlihat kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 bahwa kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Lampung Selatan masih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kontribusi total PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebesar 4,35%. Kontribusi terendah terjadi pada Tahun 2008, kontribusi yang diberikan sebesar 2,58% dan kontribusi terbesar terjadi pada Tahun 2005 sebesar 3,46%. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2,93%, besarnya kontribusi tersebut terbesar ketiga dan terkecil kedelapan dari 11 Kabupaten se-Provinsi Lampung setelah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam persen)

No	Kabupaten /Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Kotribusi PAD 2004-2008 (%)
1	Kota Bandar Lampung	60,79%	61,40%	58,84%	45,73%	60,29%	57,41
2	Kab. Way Kanan	19,35%	19,60%	9,19%	7,41%	8,00%	12,71
3	Kab. Tulang Bawang	20,66%	14,41%	24,67%	7,19%	12,72%	15,93
4	Kab. Tanggamus	19,82%	24,92%	22,48%	12,48%	20,95%	20,13
5	Kab. Lam Timur	39,74%	33,32%	25,68%	20,67%	36,46%	31,17
6	Kab. Timur Utara	34,68%	39,96%	36,15%	28,22%	36,78%	35,16
7	Kab. Lam Tengah	45,73%	39,64%	42,52%	31,44%	31,69%	38,20
8	Kab. Lam Selatan	36,75%	31,14%	34,64%	27,89%	35,37%	33,16
9	Kab. Lam Barat	18,29%	18,51%	16,04%	15,15%	13,11%	16,22
10	Kota Metro	14,20%	16,20%	14,08%	12,92%	12,03%	13,89
11	Kab. Pesawaran	-	-	-	-	52,79%	52,79
Rata-rata						29,71	

Sumber: Lampiran 2

Tabel 6 menunjukkan kontribusi yang diberikan Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kontribusi total Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebesar 29,71%. Kontribusi terendah terjadi pada Tahun 2007, kontribusi yang diberikan sebesar 27,89% dan kontribusi terbesar terjadi pada Tahun 2004 sebesar 36,75%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 33,16%, besarnya kontribusi tersebut terkecil ketujuh dari 11 Kabupaten se-Provinsi Lampung setelah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Timur.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tabel 7 di bawah ini akan menunjukkan besarnya kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung.

Tabel 7. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam persen)

No	Kabupaten /Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Kotribusi
----	-----------------	------	------	------	------	------	---------------------

							PAD 2004-2008 (%)
1	Kota Bandar Lampung	28,61%	27,66%	24,38%	18,83%	22,13%	24,32
2	Kab. Way Kanan	31,88%	27,74%	12,13%	8,19%	11,19%	18,23
3	Kab. Tulang Bawang	52,07%	33,54%	23,05%	5,22%	13,89%	25,55
4	Kab. Tanggamus	36,20%	28,25%	23,55%	10,31%	19,31%	23,52
5	Kab. Lam Timur	30,61%	38,06%	17,53%	12,12%	21,63%	23,99
6	Kab. Timur Utara	44,36%	46,40%	32,64%	28,62%	35,02%	37,41
7	Kab. Lam Tengah	19,80%	22,70%	24,05%	36,62%	42,33%	29,10
8	Kab. Lam Selatan	39,46%	35,07%	31,49%	28,88%	32,79%	33,54
9	Kab. Lam Barat	29,58%	25,62%	18,59%	20,96%	13,35%	21,62
10	Kota Metro	51,89%	57,20%	67,84%	61,62%	63,85%	60,48
11	Kab. Pesawaran	-	-	-	-	31,64%	31,64
Rata-rata							29,95

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 7 di atas kontribusi yang diberikan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kontribusi total Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebesar 29,95%. Kontribusi terendah terjadi pada Tahun 2007, kontribusi yang diberikan sebesar 28,88% dan kontribusi terbesar terjadi pada Tahun 2004 sebesar 39,46%. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 33,54%, besarnya kontribusi tersebut terkecil kesembilan dari 11 Kabupaten se-Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pesawaran.

B. Permasalahan

Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dituntut adanya kemandirian keuangan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi adanya ketergantungan dari pemerintah pusat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa rata-rata pertumbuhan

PAD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 14,66%, rata-rata capaian target PAD sebesar 87,88%, dan kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rata-rata sebesar 2,93% pada Tahun Anggaran 2004-2008. Oleh karena itu permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah perkembangan kinerja Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2008?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui kinerja setiap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2008.
2. Untuk menentukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) unggulan berdasarkan tingkat efektifitas, kontribusi, dan pertumbuhan.

3. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tentang kebijakan keuangan daerah dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah.

3. Bagi Penulis

Penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam mempraktekkan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah.

D. Kerangka Pemikiran

Keuangan Kabupaten Lampung Selatan menggambarkan penerimaan dan pengeluaran Kabupaten lampung Selatan selama periode anggaran, ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan. Secara fungsional APBD merupakan kontrak sosial antara pemerintah (daerah) dengan rakyatnya tentang kewajiban untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan warganya (Marselina, 2005: 31).

Secara keseluruhan APBD menjalankan beberapa fungsi penting yaitu:

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi yaitu ketika APBD digunakan untuk mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*) berdasarkan skala prioritas yang diambil pemerintah.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi yaitu melalui anggaran (APBD) pemerintah (daerah) dapat mengusahakan agar kesenjangan pendapatan (ekonomi), pemanfaatan hasil-hasil pembangunan lebih merata dalam masyarakat berkurang.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi yaitu ketika APBD digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kesenjangan dan gejolak ekonomi dan sosial yang terjadi dimasyarakat seperti menekan laju inflasi dan tingginya angka pengangguran.

Pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab membutuhkan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan

sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini berarti secara finansial daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan harus mampu menggali sebanyak mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Asas desentralisasi mensyaratkan adanya kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah tidak bergantung pada subsidi dan bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Kinerja Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan rasio penerimaan daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan (Abdul Halim, 2001: 100). PAD Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu ukuran dalam kemandirian keuangan hanya memberikan kontribusi 2,93% terhadap penerimaan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun Anggaran 2004-2008, rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 14,66%, dan rata-rata capaian target PAD sebesar 87,88%.

Dari latar belakang dan permasalahan yang ada maka alasan dalam menganalisis perkembangan kinerja PAD Kabupaten Lampung Selatan ini adalah Lampung Selatan

merupakan salah satu Kabupaten yang berotonomi daerah sehingga saya ingin mengetahui kinerja sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2004-2008 dengan melihat dari sumber-sumber PAD antara lain pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, jenis-jenis retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Kabupaten Lampung Selatan memiliki kontribusi PAD terhadap APBD terbesar ketiga sebesar 2,93% dari 11 Kabupaten se-Provinsi Lampung. Disamping itu, Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun Anggaran 2004-2007 masih bergabung dengan Kabupaten Pesawaran. dan pada Tahun 2008 Kabupaten Lampung Selatan sudah dipecah dengan Kabupaten Pesawaran. Dari hal tersebut, saya merasa tertarik untuk mengetahui perkembangan kinerja sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dapat dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar, terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisikan Teori-teori yang berhubungan dengan penulisan ini.

Bab III : Metode Penelitian yang berisikan Jenis Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Alat Analisis

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran